

**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DI DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

(Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal)

Oleh
SRI NELVIAWATI NOIYO
T3121109

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh

Sri Nelviawati Noiyo

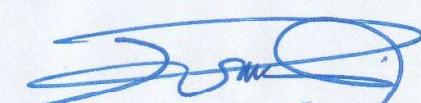
T3121109

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Teknik Informatika,
Ini Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Gorontalo, Mei 2025

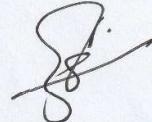
Pembimbing Utama



Irwan Abraham Salihi, M.Kom

NIDN : 0928028101

Pembimbing Pendamping

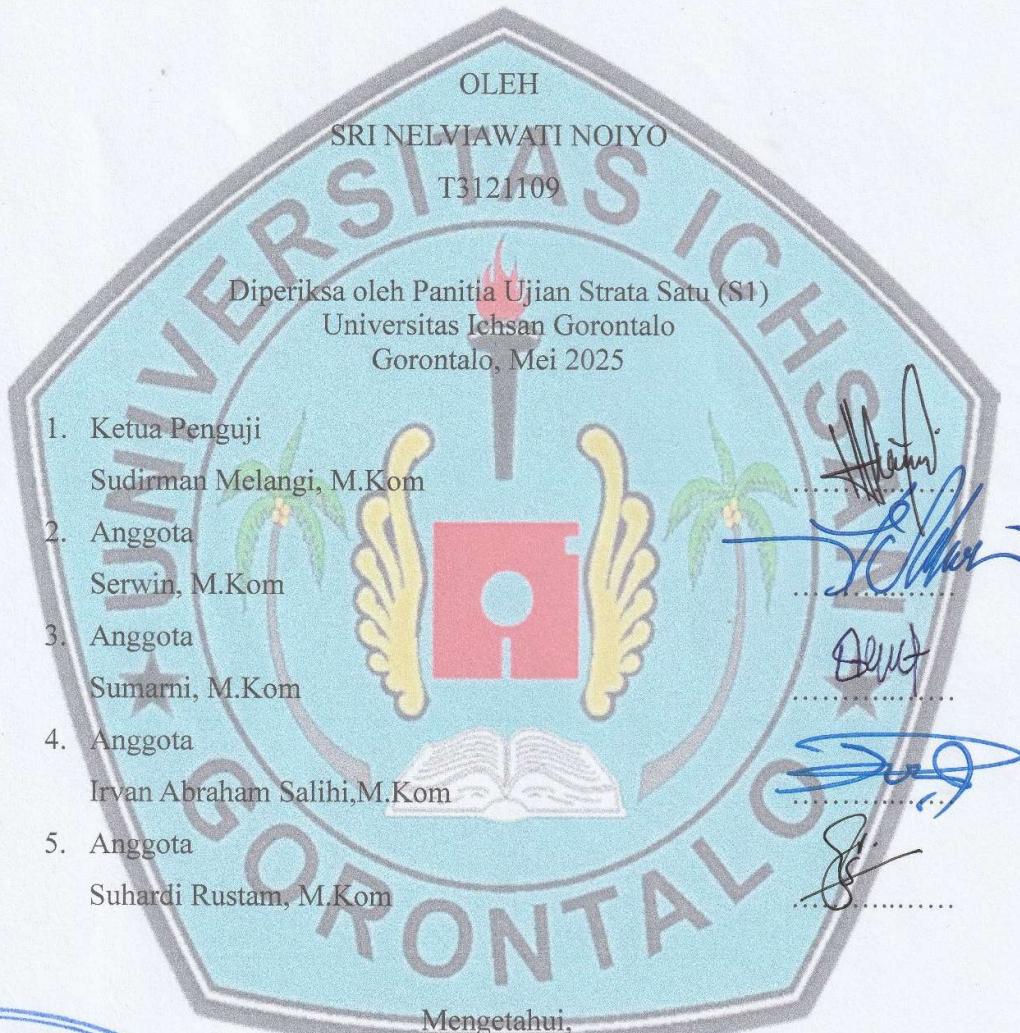


Suhardi Rustam, M.Kom

NIDN : 0915088403

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN GORONTALO UTARA



PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis (Skripsi) saya ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis (Skripsi) saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah dan dicantumkan pula dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberatan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Sri Nelviawati Noiyo

Abstract

SRI NELVIAWATI NOIYO, T3121109, THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN BUSINESS LICENSING SERVICES AT THE INVESTMENT SERVICE OF NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to analyze the implementation of e-Government in business licensing services at the Investment Office of North Gorontalo Regency. The transformation of public services through the use of information technology is expected to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of licensing services, particularly in creating a conducive investment climate. The research employed an experimental method with an approach of observation, interviews, and data collection to gather information on the system applied in the licensing process. The results show that the implementation of e-Government through the SIMPESA application has had a positive impact by accelerating the licensing process, facilitating access to information, and improving service transparency. However, there are still challenges such as limited user understanding of the system, low digital literacy, and infrastructure constraints that need to be addressed through training, outreach, and capacity building. The implementation of e-Government is expected to create better, more professional, and trusted public services in North Gorontalo Regency.

Keywords: *E-Government, Licensing Services, SIMPESA, Investment Office, North Gorontalo Regency.*



ABSTRAK

SRI NELVIAWATI NOIYO, T3121109, IMPLEMENTASI E-GOVERMNT DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Government dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara. Transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan perizinan, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam penelitian ini, digunakan metode eksperimen dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi data untuk memperoleh informasi mengenai sistem pelayanan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Government melalui aplikasi SIMPESA memberikan dampak positif dalam mempercepat proses perizinan, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan keterbukaan layanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem, kurangnya literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur pendukung yang perlu diatasi dengan pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulannya, implementasi e-Government diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, profesional, dan terpercaya di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Perizinan, SIMPESA, Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Gorontalo Utara.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH S.W.T, atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi E-governmnet Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara”**. Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dari penulis yang disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu baik dalam bentuk dukungan moril maupun materil. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Irvan Abraham Salihi, S.Kom, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak Sudirman Melangi, S.Kom, M.Kom, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Irma Surya Kumala Idris, S.Kom, M.Kom, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Sudirman S. Panna, S.Kom, M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Suhardi Rustam, S.Kom, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Kepada Orang Tua Tercinta, Bapak Ismail Noiyo dan Ibu Risna Ismail atas segala kasih sayang, dukungan dan juga doa restunya dalam mendidik dan membesarkan penulis.
10. Kepada kedua adik saya Supandri Noiyo dan Sindi Noiyo. Terima kasih banyak atas segala dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Rekan rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat besar kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat-sahabatku yang sangat penulis banggakan, Wahyuningsih Yunus, Selfi M.K Usman, Rivli Olii, dan Fadhila Dunggio, yang telah banyak membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini, terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis.
13. Kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan balasan atas jasa-jasa mereka kepada kami. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dicapai ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif. Penulis berharap semoga hasil yang telah dicapai ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gorontalo, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK (Englis).....	v
ABSTRAK (Indonesia).....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tinjauan Studi	5
2.2 Tinjauan Pustaka	8
2.2.1 Implementasi.....	8
2.2.2 <i>E-Goverment</i>	8
2.2.3 Pelayanan	8
2.2.4 Perizinan Usaha.....	10
2.3 Bahasa Pemograman	13
2.3.1 <i>PHP</i>	13
2.3.2 <i>MySQL</i>	14
2.4 Pemodelan <i>UML</i>	14
2.5 Pengujian Sistem.....	18

2.6 Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis, Metode, Subjek, Objek, Waktu, Dan Lokasi.....	20
3.2 Pengumpulan Data	20
3.3 Tahap Pembuatan	21
3.3.1 Analisis Sistem	21
3.3.2 Desain Sistem.....	22
3.3.3 Kontruksi Sistem.....	22
3.3.4 Pengujian Sistem.....	22
3.3.5 Implementasi	23
3.4 Evaluasi dan Perbaikan	23
BAB IV HASIL PENELITIAN	24
4.1 Hasil Pengunpulan Data.....	24
4.2 Model Sistem Yang Diusulkan Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha	25
4.2.1 Model Sistem Yang Diusulkan	25
4.3 Hasil Pengempangan Sistem	26
4.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	26
4.3.2 <i>Activity Diagram Login</i>	27
4.3.3 <i>Activity Diagram Perizinan Usaha</i>	27
4.3.4 <i>Sequence Diagram Login</i>	28
4.3.5 <i>Sequence Diagram Perizinan Usaha</i>	28
4.3.6 <i>Class Diagram</i>	29
4.4 Arsitektur Sistem.....	29
4.5 <i>Interface</i> Desain	30
4.5.1 Mekanisme User.....	30
4.5.2 <i>Interface</i> Desain Login.....	30
4.5.3 Dashboard.....	31
4.5.4 Tampilan Data Kelola Badan Usaha.....	31
4.5.5 Tampilan Data Kelola Pengguna	32
4.6 Data Desain	32
4.6.1 Struktur Data	32

4.7 Pengujian Sistem	34
4.7.1 Pengujian <i>White Box</i>	34
4.7.2 Pengujian <i>Black Box</i>	36
BAB V PEMBAHASAN	37
5.1 Pembahasan Sistem.....	37
5.1.1 Tampilan Halaman Login.....	37
5.1.2 Tampilan Halaman Utama.....	37
5.1.3 Tampilan Halaman Kelola Badan Usaha.....	38
5.1.4 Tampilan Halaman Verifikasi Usaha	38
5.1.5 Tampilan Halaman Komoditas	39
5.1.6 Tampilan Halaman Produk	40
5.2 Analisa Sistem Yang Diusulkan	40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
6.1 Kesimpulan	41
6.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Pikir	19
Gambar 4.1 Model Sistem Yang Diusulkan	25
Gambar 4.2 <i>Usecase</i> Diagram	26
Gambar 4.3 <i>Activity</i> Diagram Login.....	27
Gambar 4.4 <i>Activity</i> Diagram Perizinan Usaha	27
Gambar 4.5 <i>Sequence</i> Diagram Login.....	28
Gambar 4.6 <i>Sequence</i> Diagram Perizinan Usaha	28
Gambar 4.7 <i>Class</i> Diagram	29
Gambar 4.8 <i>Interface</i> Desain Login	30
Gambar 4.9 Dashboard	31
Gambar 4.10 <i>Interface</i> Desain Kelola Badan Usaha	31
Gambar 4.11 <i>Interface</i> Desain Kelola Pengguna.....	32
Gambar 4.12 <i>Flowchart</i> Program Untuk Pengujian <i>White Box</i>	34
Gambar 4.13 <i>Flowgraph</i> Program Untuk Pengujian <i>White Box</i>	35
Gambar 5.1 Halaman Login	37
Gambar 5.2 Halaman Utama	38
Gambar 5.3 Halaman Kelola Badan Usaha	38
Gambar 5.4 Halaman Verifikasi Usaha	39
Gambar 5.5 Halaman Komoditas	39
Gambar 5.6 Halaman Produk	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	5
Tabel 2.2 Simbol <i>Use Case</i> Diagram.....	14
Tabel 2.3 Simbol <i>Activity</i> Diagram.....	16
Tabel 2.4 Simbol <i>Class</i> Diagram.....	17
Tabel 2.5 Simbol <i>Sequence</i> Diagram.....	18
Tabel 4.1 Aparatur Yang Menangan Urusan Penanman Modal Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.....	24
Tabel 4.2 Mekanisme User	30
Tabel 4.3 Struktur Data Admin.....	32
Tabel 4.4 Struktur Data Perizinan Usaha.....	33
Tabel 4.5 Pengujian <i>Black Box</i>	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-Government adalah penggunaan TIK oleh badan pemerintah yang mempunyai manfaat untuk mengubah cara interaksi dengan masyarakat, bisnis, dan unit pemerintah lainnya. Meskipun proses perubahan tersebut tidak semudah yang dibayangkan, namun hal tersebut mutlak harus dilakukan. Indrajit (2006, h. 9) dalam Arief (2018) mengemukakan terdapat 3 (tiga) alasan perlunya pengembangan *E-Government*. Pertama, munculnya beberapa isu global seperti korupsi, demokrasi, dan perdagangan bebas seiring dengan arus globalisasi yang datang secara cepat. Kedua, kemajuan teknologi menyebabkan beragam berita dan ilmu pengetahuan dapat dipublikasikan secara kilat. Ketiga, kehidupan masyarakat di dunia menjadi meningkat kualitasnya.

Implementasi e-government juga sejalan dengan kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang mendorong penyederhanaan proses perizinan berusaha yang digilitas.

Gorontalo Utara merupakan salah satu dalam kabupaten Provinsi Gorontalo dengan ibu kotanya adalah kwandang. Kabupaten Gorontalo Utara secara Geografis Terletak di koordinat 0° 53' LU'-122° 39' BT. Kabupaten Gorontalo Utara berupaya meningkatkan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus dapat menyerap tenaga kerja (menurunkan angka pengangguran). Upaya kongkrit yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui penyederhanaan jenis dan prosedur layanan, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari bupati sejak tahun 2017 telah didelegasikan kepada kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan sesuai

ketentuan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah maka Pendeklasian Perizinan Berusaha

Khususnya dalam sektor pelayanan pemerintahan, proses pelayanan terus mengalami transformasi untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan zaman. Transformasi ini berlangsung sesuai dengan tuntutan era modern yang semakin maju.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk bertansformasi kearah digital dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu strategi yang ditempuh adalah implementasi e-government, namun dalam paraktiknya implementasi e-goverment belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan klasik birokrasi dalam pemerintah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo utara, seperti rendahnya transparasi seperti sistem yang belum terintegrasi sepenuhnya serta keterbatasan pemahaman operator dalam menyampaikan informasi kepada publik. Masyarakat ataupun investor masih sering menghadapi terkait informasi yang tidak terbuka, status izin yang tidak jelas, serta kurangnya akses publik yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem digital dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat ataupun investor terhadap layanan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam era digital dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pemerintah dituntut untuk meningkatkan efisiensi, transparan, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui implementasi e-government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Pelayanan perizinan berusaha merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selama ini, proses perizinan diberbagai daerah masih dianggap lambat, rumit dan kurang transparan, sehingga menjadi hambatan dalam peningakatan investasi dinas penanaman modal sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perizinan dan penanaman modal memiliki peran krusial dalam informasi pelayanan tersebut.

Melalui implementasi e-government dalam pelayanan perizinan, seperti

pengunaan sistem SIMPESA, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih cepat, akurat, dan terbuka, sistem ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan izin secara online, tanpa harus datang langsung kekantor pelayanan dinas penanaman modan Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan system yang birokrasi yang bersih dan professional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *E-Government* Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apa saja upaya dinas penamanan modal Kabupaten Gorontalo Utara dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan akurat kepada pelaku usaha?
2. Implementasi E-government melalui sistem simpesa dalam mempercepat dan mepermudah proses peizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Dinas Penamanan Modal Kabupaten Gorontalo Utara dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan akurat kepada pelaku usaha?
2. Bagaimana Implementasi E-government melalui system simpesa dalam mempercepat dan mepermudah proses peizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara Dalam memberikan akses informasi yang terbuka dan akurat?
2. Untuk mengetahui kualitas implementasi E-government melalui system simpesa dalam mempercepat dan mepermudah proses peizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Pengembangan Ilmu

Peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi komputer serta dapat menerapkan *E-goverment* dalam perizinan berusaha di dinas penanaman modal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti implementasi *E-governmnet* di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara.

3. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan juga bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan peneliti serta mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah peneliti dapatkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Studi

Adapun dalam penelitian ini peneliti melampirkan tiga hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

NO	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil
1	Mai Puspadyna Bilyastuti	Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)	2019	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Pelaksanaan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan Sistem Informasi Perizinan Terpadu belum bisa berjalan secara maksimal. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya

NO	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil
					warga masyarakat yang memilih mengurus perizinan melalui kantor DPMPTSP dari pada menggunakan aplikasi perizinan secara <i>online</i> .
2.	Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, Andi Yusuf Katili	Inovasi Pelayanan Publik Melalui <i>E-governmnet</i> Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo	2022	Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif	Pelayanan Publik Melalui <i>E-governmnet</i> Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo sudah terlaksana dengan optimal, namun pada tipe perubahan radikal yang menitikberatkan pada rasionalitas

NO	Peneliti	Judul	Tahun	Metode	Hasil
					Belum optomal.
	Joni Dawud, Rodlial Ramdhhan Tackbir Abubakar, Deni Fauzi Ramdani	Implementasi Kebijakan <i>Online Single Submission</i> pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)	2020	menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	dapat disimpulkan bahwa implementasi <i>Online Single Submission</i> oleh DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya Regulasi turunan yang telah diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah tersebut yang digunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu cara untuk mewujudkan sebuah sistem adalah melalui proses implementasi. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan pernah terealisasi tanpa adanya implementasi. Pada hakikatnya, implementasi kebijakan bukan sekadar mengubah keputusan politik menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, melainkan juga mencakup persoalan konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat yakni siapa yang mendapatkan apa dari suatu kebijakan.

2.2.2 *E Government*

Electronic Government atau e-Government merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan kemudahan dalam mengakses informasi publik (Sari dan Winarno, 2012). Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta meningkatkan mutu layanan publik, diperlukan penerapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan e-Government. Panduan nasional terkait hal ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, yang menjadi acuan pengembangan e-Government di seluruh sektor pemerintahan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai e-Government harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Selain itu, insentif bagi masyarakat juga dibutuhkan, mengingat masih rendahnya pemahaman terkait konsep, penerapan aplikasi e-Government, serta manfaat yang dapat diperoleh dari sistem tersebut.

2.2.3 Pelayanan

Pelayanan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1982), adalah cara atau metode dalam memberikan jasa atau kemudahan terkait dengan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut Hodges, pelayanan berasal dari kata "melayani," yang berarti seseorang yang pekerjaannya memenuhi kepentingan dan keinginan orang lain. Sementara itu, berdasarkan Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa elemen penting dalam definisi pelayanan mencakup:

- a. Pelayanan dilakukan oleh suatu lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta.
- b. Masyarakat (publik) adalah pihak yang dilayani berdasarkan kebutuhannya.
- c. Pelayanan berupa barang atau jasa.
- d. Adanya aturan, sistem, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya.

Masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang berkualitas dari birokrasi pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering kali tidak sesuai dengan harapan, karena pelayanan publik yang ada selama ini sering kali terkesan rumit, lambat, mahal, dan melelahkan. Hal ini terjadi karena masyarakat sering diposisikan sebagai pihak yang "melayani," bukannya yang "dilayani." Oleh karena itu, reformasi pelayanan yang mendesak perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan dan menempatkan pemahaman yang benar tentang siapa yang "melayani" dan siapa yang "dilayani" (Abbas dan Sadat, 2020). Dengan demikian, pelayanan publik bisa dilakukan oleh baik pemerintah maupun swasta, namun jika pemerintah adalah penyelenggara birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintah merupakan pihak yang paling terkait langsung dengan pelayanan publik tersebut.

Pemerintah telah mengembangkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman digital, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan publik melalui media elektronik, yang dikenal dengan istilah *Electronic Government*. Tujuan dari *Electronic Government* adalah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan akses internet guna menjalankan sistem pemerintahan, sehingga proses pelayanan dapat lebih optimal, efektif, dan efisien (Auliya, Hidayat, dan Nababan 2022). Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan, yang dijabarkan oleh Riani (2021) sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan yang mudah, tidak rumit, dan mudah dipahami serta dijalankan.
- b. Kejelasan, mencakup hal-hal seperti: 1) Persyaratan teknis dan administratif dalam pelayanan publik; 2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan serta menyelesaikan masalah atau sengketa terkait pelayanan; 3) Rincian biaya pelayanan dan prosedur pembayarannya.
- c. Kepastian waktu, yang berarti pelayanan harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi, yaitu layanan yang diterima harus benar, tepat, dan sah.
- e. Keamanan, yakni proses dan hasil pelayanan harus memberikan rasa aman serta kepastian hukum.

2.2.4 Perizinan Usaha

Perizinan Usaha Sebelum membahas secara detail tentang apa itu perizinan usaha, perlu ditahui apa itu perizinan secara luas, ruang lingkup perizinan, tujuan dan motif perizinan serta kewenangan pejabat pemberi izin, sebagai berikut :

1. Izin

Secara normatif perizinan merupakan wujud tindakan hukum pemerintah yang bersifat konkret sebagai “Normativisasi” ketentuan produk hukum yang sifatnya lebih umum. Dalam kaitannya dengan Pemerintahan Daerah, perizinan sebagai suatu dokumen hukum tentunya bersumber dan/atau sebagai penjabaran produk hukum Pemerintahan Daerah yang sifatnya lebih umum dan kedudukannya lebih tinggi seperti Peraturan Daerah, Peraturan maupun Keputusan Kepala Daerah.

Perizinan secara umum merujuk pada pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang dapat berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku warga. Selain itu, izin juga bisa dipahami sebagai pengecualian atau pembebasan dari suatu larangan. Berikut adalah penjelasan tentang izin, baik dalam arti luas maupun sempit:

- a. Izin dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang memberikan akibat yang kurang lebih sama, yakni memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang dalam bentuk tertentu.
- b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan yang pada dasarnya dilarang, kecuali jika diberikan izin, dengan tujuan agar ketentuan yang terkait dengan izin tersebut dapat diberikan batasan yang jelas untuk setiap kasus.

2. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

- a. Dari sisi pemerintah Tujuan pemberian izin oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
 1. Untuk menerapkan peraturan, Tujuannya adalah untuk memastikan apakah peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan untuk menjaga ketertiban.
 2. Sebagai sumber pendapatan daerah, Dengan adanya permohonan izin, pendapatan pemerintah daerah akan meningkat karena setiap izin yang diberikan mengharuskan pemohon membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak izin yang diterbitkan, semakin besar pula pendapatan dari sektor retribusi, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut:
 1. Untuk memperoleh kepastian hukum.
 2. Untuk mendapatkan kepastian hak.
 3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah pembangunan yang dilakukan memiliki izin, dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada sistem perizinan, undang-undang dapat mencapai berbagai tujuan dari izin tersebut.

Motif penggunaan sistem izin dapat mencakup:

1. Mengontrol perilaku warga.
2. Mencegah kerusakan atau bahaya bagi lingkungan hidup.
3. Melindungi objek-objek tertentu.
4. Mengelola pembagian sumber daya yang terbatas.
5. Mengarahkan aktivitas masyarakat.

1. Izin Usaha

Izin usaha, yang dikenal juga sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), merupakan izin yang diperoleh melalui pemenuhan berbagai ketentuan dan persyaratan dalam bentuk surat resmi, yang berfungsi untuk memberikan legalitas dalam menjalankan usaha perdagangan sekaligus melindungi usaha dari gangguan yang tak terduga. SIUP ini diklasifikasikan berdasarkan besarnya modal usaha, yaitu:

- a. SIUP Mikro, diberikan kepada usaha perdagangan mikro dengan total modal dan kekayaan bersih tidak melebihi Rp 50 juta.
- b. SIUP Kecil, wajib dimiliki oleh usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. SIUP Menengah, ditujukan bagi perusahaan perdagangan yang memiliki modal dan kekayaan bersih sebesar Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. SIUP Besar, diwajibkan untuk perusahaan perdagangan dengan total modal dan kekayaan bersih di atas Rp 10 miliar, juga tidak termasuk nilai tanah dan bangunan usaha.

Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, proses pelaksanaan perizinan berusaha mencakup:

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang berbasis komitmen;
- c. Pemenuhan komitmen terkait Izin Usaha maupun Izin Komersial/Operasional;
- d. Pembayaran biaya terkait perizinan;
- e. Pemberian fasilitas;
- f. Penetapan masa berlaku izin;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan izin;
- h. Unggah dokumen yang diperlukan.

2.3 Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yaitu bahasa yang digunakan untuk menuliskan kode-kode program komputer. Kode program tersebut berisi serangkaian perintah yang akan dieksekusi oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Beberapa bahasa pemrograman populer termasuk *Python*, *JavaScript*, *Ruby*, dan lain sebagainya. Setiap bahasa pemrograman memiliki kegunaan dan kelebihan yang berbeda. Beberapa bahasa pemrograman lebih cocok dipakai untuk membangun web, sementara yang lain lebih cocok untuk pengembangan perangkat lunak desktop atau perangkat *mobile*.

2.3.1 *PHP*

PHPMyAdmin adalah perangkat lunak gratis(freeware) yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP, yang dimaksudkan untuk menangani administrasi database MySQL melalui Interface Web. *PHPMyAdmin* mendukung berbagai operasi di database MySQL dan MariaDB. Operasi paling yang sering digunakan seperti mengelola database, tabel, kolom, relasi, indeks, pengguna, izin, dan lainnya, Dapat dilakukan melalui antarmuka pengguna, sementara itu juga masih bisa menulis perintah SQL secara langsung untuk operasi pengelolaan database nya.

2.3.2 MySQL

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS Multithread dan multi user. MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis.

1.4 Pemodelan Dengan *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Namun ,model-modelnya berhubungan langsung dengan berbagai macam bahsa pemograman, memungkinkan pemetaan langsung dari model-model tersebut. Studi ini hanya menggunakan empat diagram desain: Use case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram.

1. Use Case Diagram

Use Case diagram jika dilihat dari sudut pandang pengguna, usecase diagram menunjukkan hubungan antara actor dan usecase sistem.

Tabel 2.2 Simbol *Use Case Diagram*

NO	NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
1	<i>Actor</i>		Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case.
2	<i>Dependency</i>		Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (independent).

3	<i>Generalization</i>		Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor).
4	<i>Include</i>		Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara explicit.
5	<i>Extend</i>		Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan.
6	<i>Association</i>		Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7	<i>System</i>		Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
8	<i>Use Case</i>		Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
9	<i>Collaboration</i>		Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemennya (sinergi).
10	<i>Note</i>		Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi.

2. *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang terjadi dalam suatu use case.

Tabel 2.3 Simbol *Activity Diagram*

NO	NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
1	<i>Activity</i>		Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2	<i>Action</i>		State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
3	<i>Initial Node</i>		Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
4	<i>Activity Final Node</i>		Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan.
5	<i>Fork Node</i>		Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran.

3. *Class Diagram*

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. *Class* menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi).

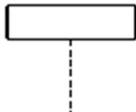
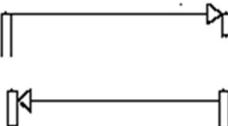
Tabel 2.4 Simbol *Class Diagram*

NO	NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
1	<i>Generalization</i>	—	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (ancestor).
2	<i>Nary Association</i>	◇	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
3	<i>Class</i>	□	Himpunan dari objek-objek yang terbagi atribut serta operasi yang sama.
4	<i>Collaboration</i>	○	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
5	<i>Realization</i>	◁-----	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6	<i>Dependency</i>	----->	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (independent) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
7	<i>Association</i>	—	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

4. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek tersebut.

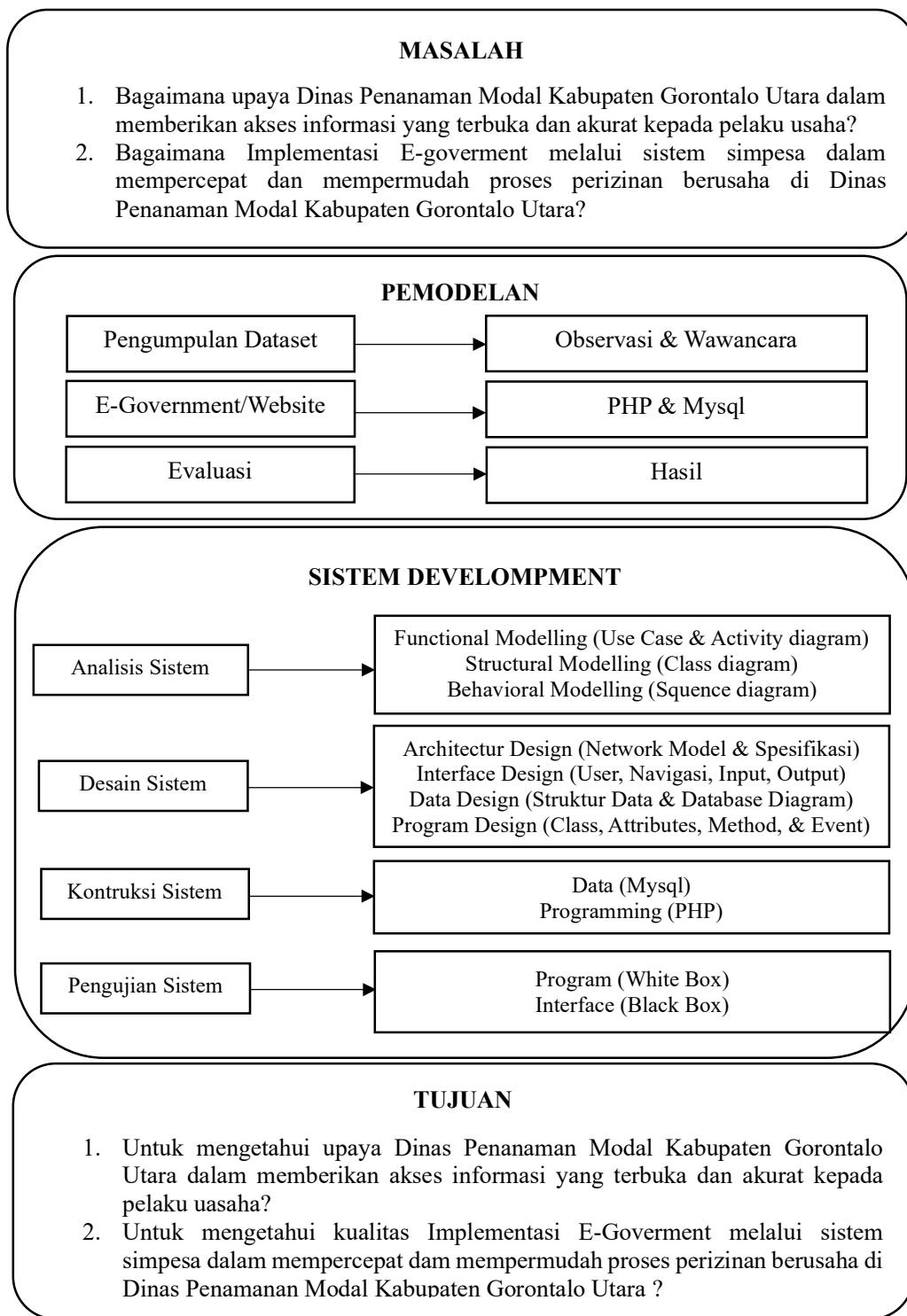
Tabel 2.5 Simbol *Sequence Diagram*

NO	NAMA	GAMBAR	KETERANGAN
1	<i>Life Line</i>		Objek entity, antarmuka yang saling berinteraksi
2	<i>Message</i>		Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi tentang aktifitas yang terjadi.

2.5 Pengujian sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur beroperasi dengan baik. Pada tahap ini, eksperimen dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal untuk meningkatkan sistem. Sistem diuji untuk memastikan semua fitur berfungsi baik, dan umpan balik dari pengguna awal dikumpulkan untuk perbaikan.

1.5 Kerangka Pikir



Gambar2.6 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Metode, Subjek, Objek, Waktu, Dan Lokasi

Berdasarkan penelitian diatas merupakan penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen.

Metode eksperimen merupakan jenis penelitian yang bertujuan membuktikan pengaruh suatu perlakuan terhadap akibat dari perlakuan tersebut. Pada umumnya metode penelitian eksperimen digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Namun bukan berarti metode ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial. Metode eksperimen juga dilakukan terhadap data-datanya belum ada, sehingga diperlukan proses manipulasi dengan memberikan perawatan atau perlakuan tertentu kepada subjek penelitian, yang kemudian diamati dan diukur dampak dari perubahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir yang telah diuraikan pada BAB I dan BAB II maka yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi *E-Government* Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini di mulai dari Agustus 2024 sampai dengan September yang berlokasi di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ada dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder :

1. Penelitian data primer

Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di Dinas Penanaman Modal.

Yang akan dijadikan sebagai data dalam menganalisis suatu sistem pendukung keputusan. Maka dilakukan dengan teknik:

- a) Observasi, dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung penulisan agenda kegiatan yang dilakukan secara manual, sehingga dapat secara langsung mengetahui bagaimana alur pencatatan agenda kegiatan.
- b) Wawancara, melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan data-data dan alur penelitian seakurat mungkin.

2. Penelitian data sekunder

Data yang diperoleh dari studi literatur yang dilakukan. Sumber dari studi literatur yaitu jurnal, makalah ilmiah, atau buku yang membahas tentang penelitian tersebut.

3.3 Tahap Pembuatan

3.3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem adalah suatu proses penguraian suatu data atau informasi yang utuh dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi mengenai suatu hambatan atau segala permasalahan yang didalamnya. Analisis sistem dibutuhkan dalam meneliti bagaimana suatu sistem berjalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam tahap analisis sistem, langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah sebagai berikut:

- a. *Identify*, yaitu menemukan masalah sistem.
- b. *Understand* yaitu memahami kerja dari sistem yang sudah berjalan dengan melakukan studi kelayakan pada sistem,
- c. *Analyze* yaitu menganalisis sistem yang sudah diidentifikasi dan dipahami, dengan begitu sistem dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna,
- d. *Report* yaitu membuat laporan hasil analisis yang telah dilakukan.

3.3.2 Desain Sistem

Desain sistem menggunakan pendekatan berorientasi objek yang digambarkan dalam bentuk:

1. *Architecture Design*, menggunakan alat bantu *UML*, dalam bentuk :
 - a) Model jaringan dari sistem adalah *stand alone*.
 - b) Spesifikasi *hardware* dan *software* yang direkomendasikan.
2. *Interface Design*, menggunakan alat bantu *UML*, dalam bentuk :
 - Mekanisme *User*
 - Mekanisme Navigasi
 - Mekanisme Input (*Page*)
 - Mekanisme Output (*Report*)
3. *Data Design*, menggunakan alat bantu *UML*, dalam bentuk :
 - Format Data yang digunakan file *SQL*
 - Struktur Data
 - Database Diagram
4. *Program Design*, menggunakan alat bantu *UML*, dalam bentuk :
 - *Class* - *Attributes*
 - *Method* - *Event*

3.3.3 Kontruksi Sistem

Pada tahap ini alat bantu yang di gunakan adalah *Visual Studio Code* sebagai teks editor, dengan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai databasenya.

3.3.4 Pengujian Sistem

1. Pengujian *White Box*

Software yang sudah direkayasa kemudian diuji dengan metode *White Box Testing* pada kode program proses penerapan metode/modelnya. Kode program tersebut dibuatkan flowchart programnya, kemudian dipetakan kedalam bentuk *flowgraph* (bagan air control) yang tersusun dari beberapa *node* dan *edge*.

2. Pengujian *Black Box*

Selanjutnya software diuji pula dengan metode Black Box yang fokus pada keperluan fungsional dari software dan berusaha untuk menemukan kesalahan kategori, seperti:

- a) Kesalahan fungsi atau fungsi yang hilang
- b) Kesalahan interface
- c) Kesalahan dalam struktur data atau akses ke basis data eksternal
- d) Kesalahan performa
- e) Kesalahan inisialisasi dan terminasi

Apabila tidak terdapat permasalahan pada permasalahan tersebut di atas, maka sistem dikatakan efisiensi berdasarkan permasalahan pada komponen-komponen sistem tersebut.

3.3.5 Implementasi

Pada tahap ini dimana penerapan serta pengujian sistem baru, yang merupakan tahap dimana aplikasi siap untuk digunakan dalam kondisi nyata, secara khusus, kinerja sistem baru akan diketahui untuk dioperasikan pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara.

3.4 Evaluasi Dan Perbaikan

Evaluasi adalah bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari metode yang telah dilakukan, evaluasi dilakukan untuk menatah hasil kriteria-kriteria dari data untuk pelayanan perizinan berusaha menggunakan metode eksperimen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data penelitian ini diambil dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan organisasi perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis urusan penanaman modal, penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu dalam peratutan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Pelayanan Perizinan Berusaha ini merupakan penyempurnaan yang terus dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk perbaikan iklim usaha sekaligus melindungi ekosistem baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi kemudian melakukan observasi dan wawancara di lokasi tersebut.

Adapun hasil pengumpulan data yang diambil dari lokasi penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Aparatur yang menangani urusan Penanaman Modal dan Penyelenggaran Pelayanan Perizinan

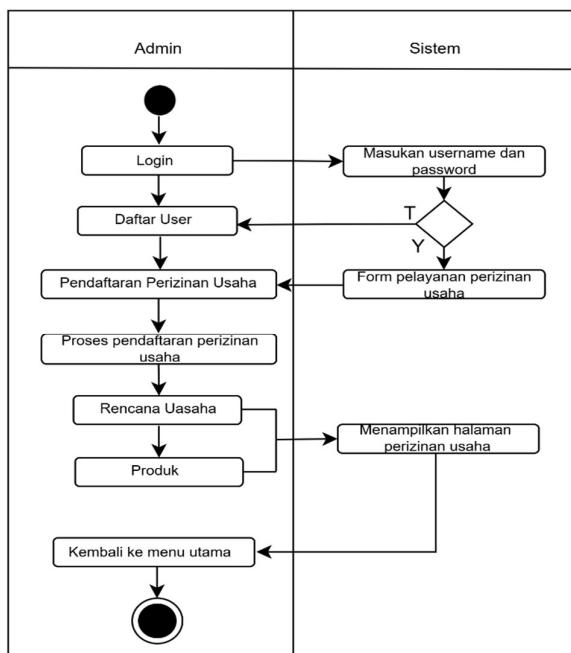
NO.	SUB BIDANG	ASN		P3K		PENDAMPING /HONORER	
		Laki-Laki	Wanita	Laki-Laki	Wanita	Laki-Laki	Wanita
1	Sekretariat	2	3	0	3	2	1
2	Bid. Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	0	3	0	1	0	
3	Bid. Pengaduan Informasi Kebijakan dan Laporan Layanan	1	1	0	0	0	0
4	Bid. Perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal		2	0	0	0	0
5	Bid. Promosi Penanaman Modal	1	1	0	0	0	0
6	Bid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2	1	0	2	0	1
	JUMLAH		17		6		4
	JUMLAH ASN DAN NON ASN				27		

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Gorontalo Utara, 2024

Tabel di atas memuat data Jumlah pegawai berdasarkan jenis kepegawaian dan jenis kelamin di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024. Jumlah total pegawai sebanyak 27 orang, terdiri dari 23 ASN (17 laki-laki dan 6 perempuan), 6 P3K (seluruhnya perempuan), dan 4 pendamping/honorer (3 laki-laki dan 1 perempuan). Pegawai tersebar di enam sub bidang, dengan Jumlah terbanyak berada di Sub Bidang Sekretariat sebanyak 11 orang. Sementara itu, sub bidang lainnya memiliki Jumlah pegawai yang lebih sedikit, berkisar antara 2 hingga 6 orang. Data ini menggambarkan komposisi sumber daya manusia di masing-masing sub bidang dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Gorontalo Utara.

4.2 Model Sistem Yang Diusulkan Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha

4.2.1 Model Sistem Yang Diusulkan



Gambar 4.1 Model Sistem Yang Diusulkan

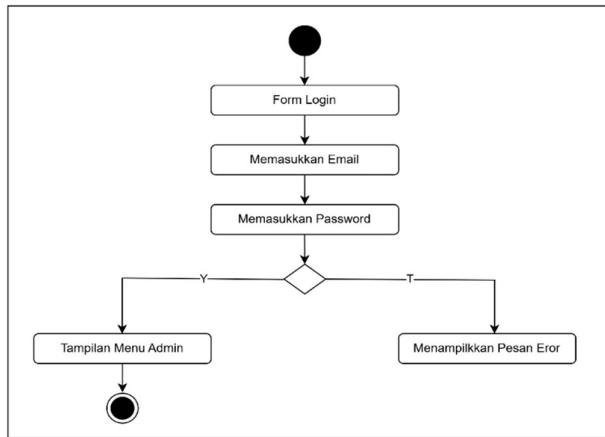
Diagram ini menggambarkan proses lengkap pendaftaran perizinan usaha oleh admin, dimulai dari login hingga input data usaha dan produk. Proses ini

melibatkan interaksi antara admin dan sistem, serta mencakup validasi login dan pengisian formulir yang relevan.

4.3 Hasil Pengembangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan pemahaman umum tentang sistem baru kepada pengguna. Pada bagian ini, akan dijelaskan alur data dan proses sistem, yang akan digambarkan dalam *Use Case*, *Activity*, *Sequence*, dan *Class Diagram*.

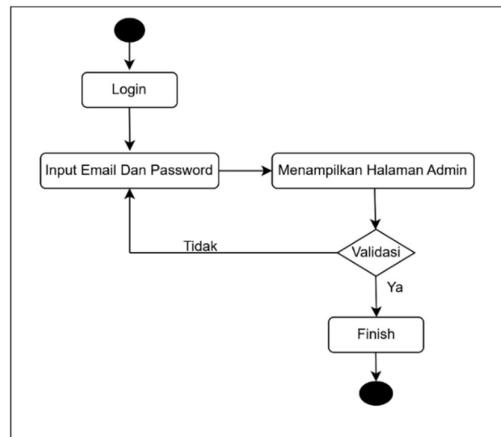
4.3.1 Use Case Diagram Login



Gambar 4.2 *Usecase* Diagram Login

Diagram ini menggambarkan proses login, dimana pengguna harus memasukkan email dan password dengan benar untuk bisa mengakses menu admin. Jika salah, sistem memberikan umpan balik berupa pesan kesalahan.

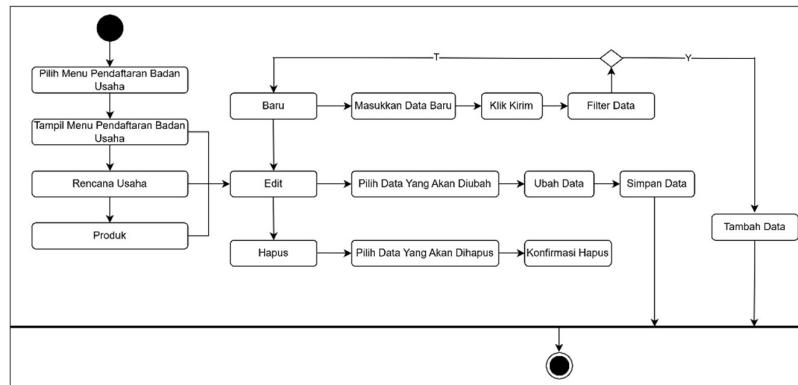
4.3.2 Activity Diagram Login



Gambar 4.3 *Activity* Diagram Login

Diagram ini menunjukkan proses login. Pengguna harus memasukkan email dan password yang benar agar bisa mengakses halaman admin. Jika tidak sesuai, pengguna harus mengulang input sampai berhasil.

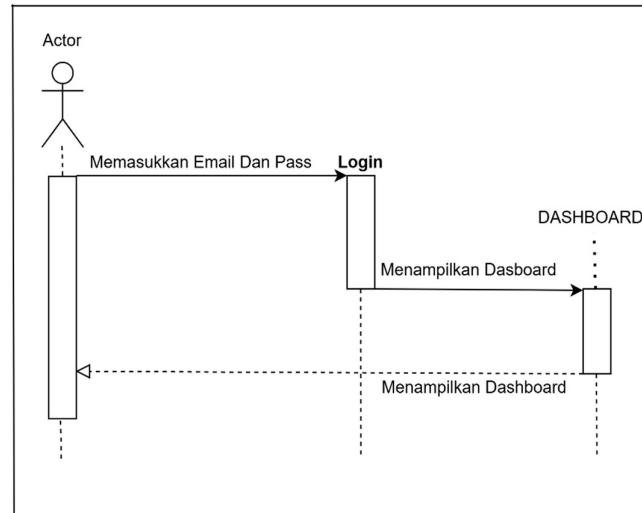
4.3.3 Activity Diagram Perizinan Usaha



Gambar 4.4 Activity Diagram Perizinan Usaha

Diagram ini menjelaskan alur kerja dalam sistem pendaftaran badan usaha, dimulai dari pemilihan menu, kemudian pengguna dapat menambah, mengedit, atau menghapus data sesuai kebutuhan, hingga proses berakhir.

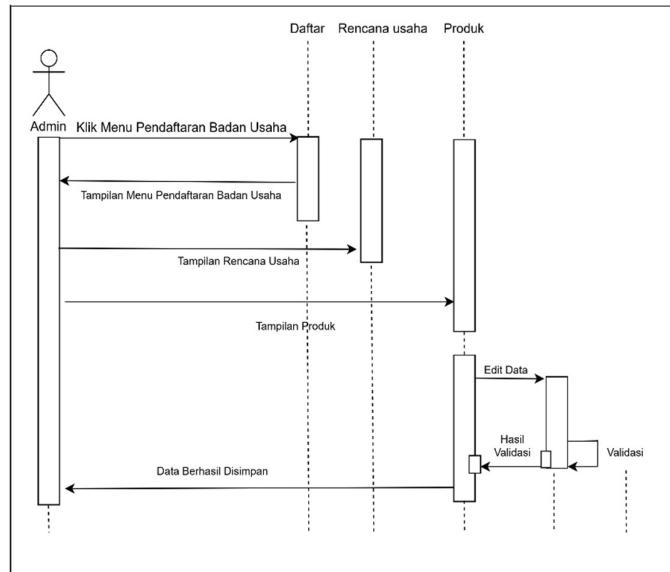
4.3.4 Sequence Diagram Login



Gambar 4.5 Sequence Diagram Login

Diagram ini menjelaskan alur login pengguna ke dalam sistem jika data login benar masuk ke dashboard, Jika salah muncul pesan error.

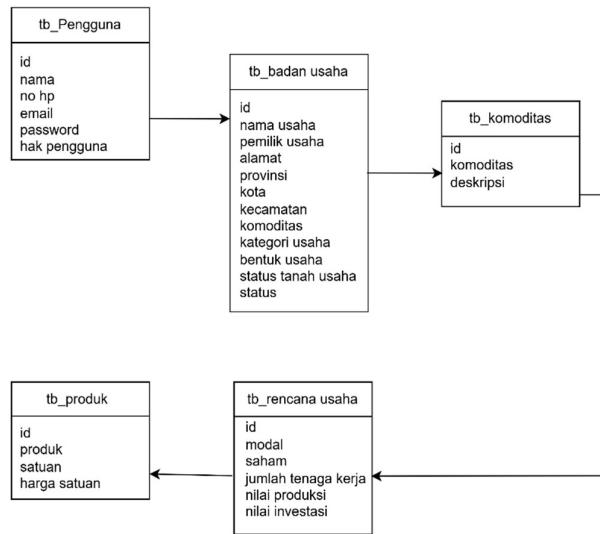
4.3.5 Sequence Diagram Perizinan Usaha



Gambar 4.6 Sequence Diagram Perizinan Usaha

Diagram ini menggambarkan proses pendaftaran dan verifikasi izin usaha dari awal oleh admin. Diagram menunjukkan alur kerja antar beberapa instansi dan sistem, dengan validasi dan verifikasi di setiap tahap yang relevan.

4.3.6 Class Diagram



Gambar 4.7 Class Diagram

Diagram ini menggambarkan rancangan basis data untuk sistem pengelolaan dan pendaftaran badan usaha, mencakup informasi pengguna, usaha, komoditas, produk, dan perencanaan usaha.

4.4 Arsitektur Sistem

Untuk kinerja sistem yang optimal, sebaiknya gunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Processor : *Intel Celeron* atau diatasnya
2. RAM : 4GB
3. VGA : 64 bit
4. Hardisk : 1TB
5. Operating system : Windows 10
6. Tools : Xampp, VS Code
7. Bahasa Pemograman : *PHP*

8. Database : *PHPmyadmin, MySQL*

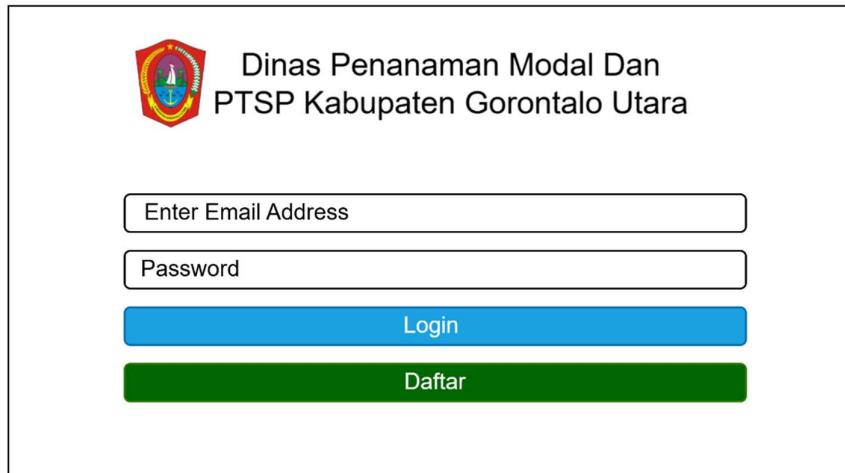
4.5 Interface Desain

4.5.1 Mekanisme User

Tabel 4.2 Mekanisme User

User	Kategori	Akses Input	Akses Output
Admin	Administrator	All	All

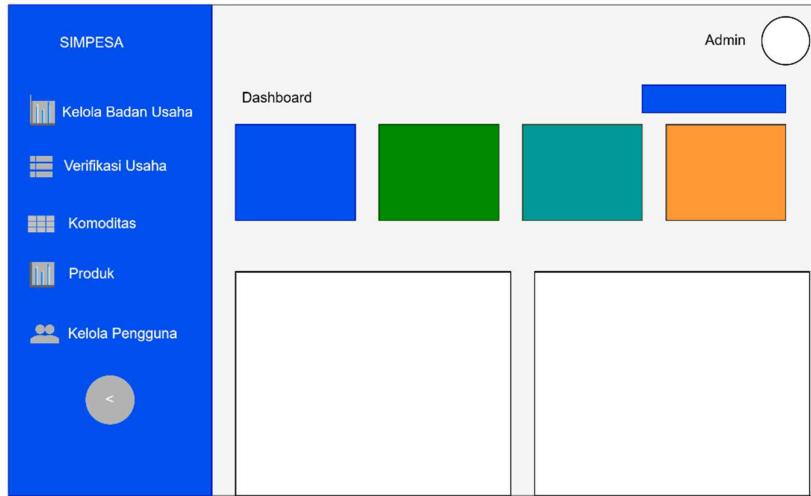
4.5.2 Interface Desain Login



Gambar 4.8 Interface Desain Login

Halaman ini akan membawa kehalaman admin atau *login* dengan memasukkan *email* dan *password*, klik tombol “*Login*” untuk melanjutkan proses login. Selain itu terdapat menu daftar untuk pengguna yang belum terdaftar.

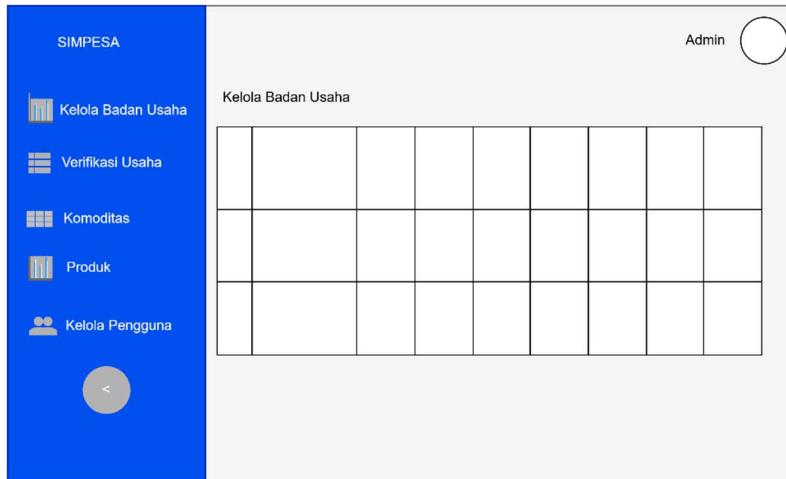
4.5.3 Dashboard



Gambar 4.9 Dashboard

Halaman ini merupakan halaman utama Admin. Halaman ini terdiri dari Kelola Badan Usaha, Verifikasi Usaha, Komoditas, Produk, dan Kelola Pengguna.

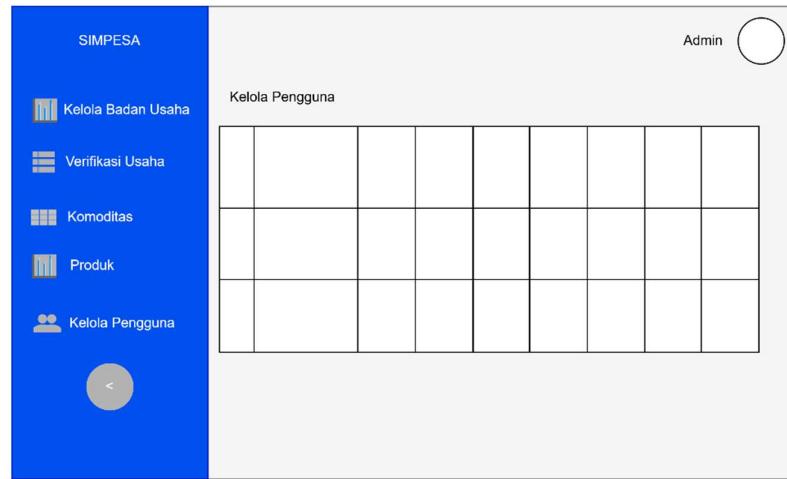
4.5.4 Tampilan Data Kelola Badan Usaha



Gambar 4.10 Interface Desain Kelola Badan Usaha

Halaman ini merupakan tampilan Badan Usaha yang menampilkan untuk mengelola badan usaha.

4.5.5 Tampilan Data Kelola Pengguna



Gambar 4.11 Interface Desain Kelola Pengguna

Halaman ini merupakan tampilan Kelola Pengguna yang mengelola data produk dalam sistem SIMPESA.

4.6 Data Desain

4.6.1 Struktur Data

Tabel 4.3 Struktur Data Admin

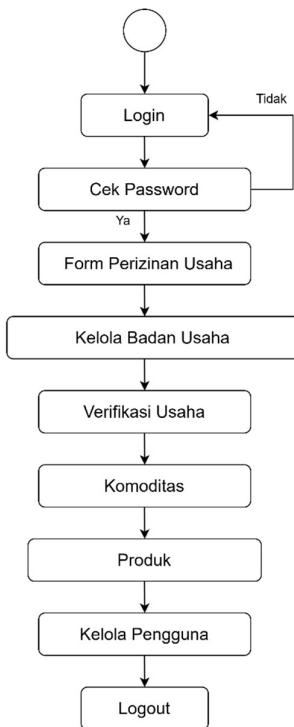
Nama File	:	db_simpesa		
Primary	:	Id_admin		
Media	:	Hardisk		
Fungsi	:	Merupakan Data Admin		
Struktur Data				
No	Field Name	Type	Size	Keterangan
1.	Id_Admin	Int	12	Id_Admin
2.	Email	Varchar	64	Email
3.	Password	Varchar	64	Password

Tabel 4.4 Struktur Data Perizinan Usaha

Nama File	: Tb_Badan Usaha			
Primary	: Id_perizinan usaha			
Media	: Hardisk			
Fungsi	:Merupakan Data Perizinan Usaha			
Struktur Data				
No	Field Name	Type	Size	Keterangan
1.	Id_Admin	Int	11	Id_Admin
2.	Nama usaha	Varchar	20	Nama Usaha
3.	Pemilik Usaha	Varchar	54	Pemilik Usaha
4.	Alamat	Varchar	125	Alamat
5.	Provinsi	Varchar	125	Provinsi
6.	Kota	Varchar	125	Kota
7.	Kecamatan	Varchar	125	Kecamatan
8.	Komoditas	Varchar	55	Komoditas
9.	Kategori Usaha	Varchar	125	Kategori Usaha
10.	Bentuk Usaha	Varchar	125	Bentuk Usaha
11.	Status Tanah Usaha	Varchar	154	Status Tanah Usaha
12.	Status	Varchar	54	Status

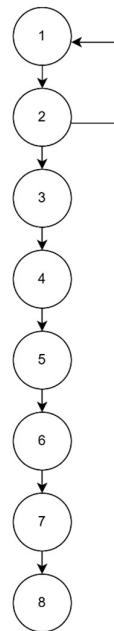
4.7 Pengujian Sistem

4.7.1 Pengujian *White Box*



Gambar 4.12 Flowchart Program Untuk Pengujian White Box

Diagram ini menunjukkan alur interaksi pengguna dengan sistem perizinan usaha, mulai dari login hingga logout, serta fitur-fitur pengelolaan data yang tersedia seperti badan usaha, komoditas, produk, dan pengguna.



Gambar 4.13 Flowgraph Program Untuk White Box

Flowgraph ini terdiri dari 8 Node yang merepresentasikan alur utama program atau sistem perizinan usaha, di mana masing-masing node menggambarkan langkah-langkah logis dalam sistem.

- Dari node **2 (Login)** ke **3 (Cek Password)**, ada kemungkinan loop back ke node 2 jika login gagal.
- Setelah login berhasil, proses akan berjalan secara sekuensial ke node 4, 5, 6, 7, dan 8.
- Node **7** bisa bercabang ke fitur tambahan seperti:
 - Kelola Komoditas
 - Kelola Produk
 - Kelola Pengguna

4.7.2 Pengujian *Black Box*

Tabel 4.5 Pengujian Black Box

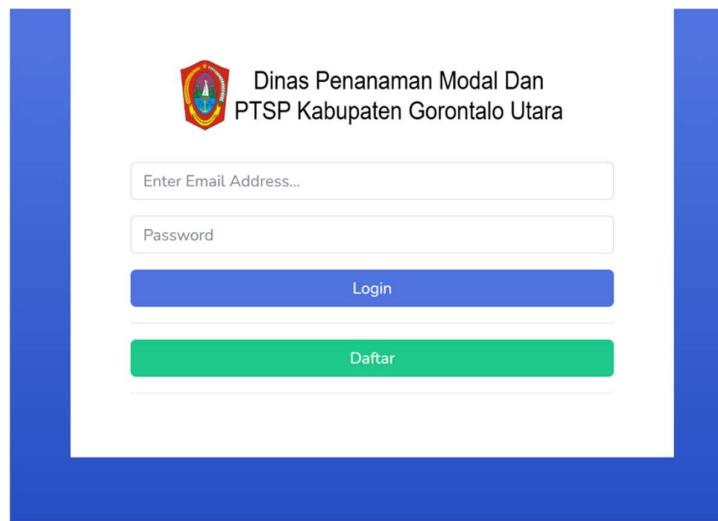
INPUT/EVENT	FUNGSI	HASIL	HASIL UJI
Masukkan Email dan Password yang salah	Menguji Validasi Email dan Password	Tampilan pesan “Email dan Password salah”	Sesuai
Masukkan Email dan Password yang benar	Menguji Validasi Email Dan Password	Tampilan halaman Dashboard	Sesuai
Klik Menu Pendaftaran Badan Usaha	Menampilkan halaman Pendaftaran Badan Usaha	Tampilan halaman Pendaftaran Badan Usaha	Sesuai
Klik Daftar	Menambah Data Pendaftaran	Tampilan form tambah Pendaftaran	Sesuai
Tambahkan Data dan klik “Krim”	Menyimpan Data	Data Berhasil disimpan	Sesuai
Klik Rencana Usaha	Menampilkan halaman Rencana Usaha	Tampilan halaman Rencana Usaha	Sesuai
Tambahkan Data dan klik “simpan”	Menyimpan Data	Data berhasil disimpan	Sesuaia
Klik Produk	Menampilkan halaman Produk	Tampilan halaman Produk	Seusai
Tambahkan Data dan klik” simpan”	Menyimpan Data	Data berhasil disimpan	Sesuai

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Sistem

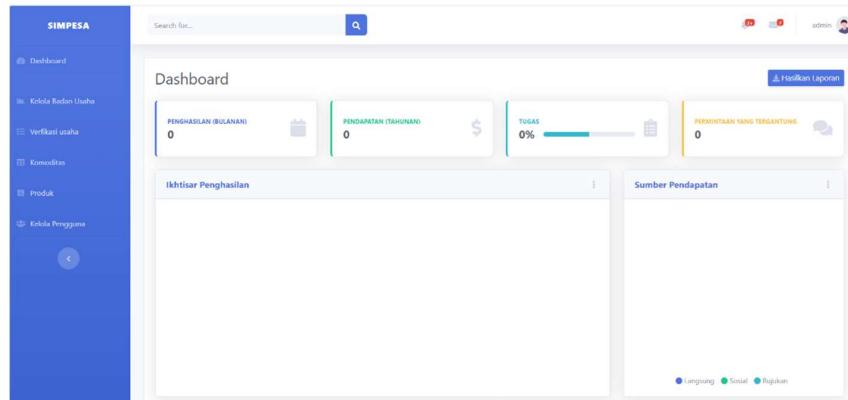
5.1.1 Tampilan Halaman Login



Gambar 5.1 Halaman Login

Halaman ini akan membawa kehalaman admin atau *login* dengan memasukkan *email* dan *password*, klik tombol “*Login*” untuk melanjutkan proses login. Selain itu terdapat menu daftar untuk pengguna yang belum terdaftar.

5.1.2 Tampilan Halaman Utama



Gambar 5.2 Halaman Utama

Halaman ini merupakan halaman utama Admin. Halaman ini terdiri dari Kelola Badan Usaha, Verifikasi Usaha, Komoditas, Produk, dan Kelola Pengguna.

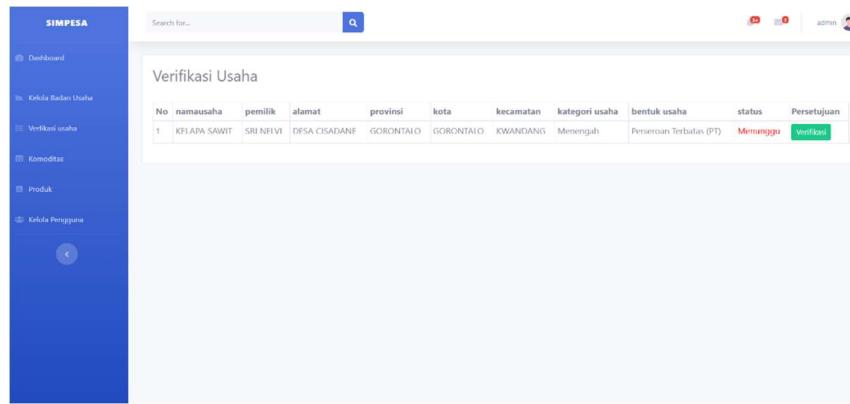
5.1.3 Tampilan Halaman Kelola Badan Usaha

No	nama	pemilik usaha	alamat	provinsi	kota	kecamatan	kategori usaha	bentuk usaha	status tanah usaha	status verifikasi	Opsi
1	PABRIK GULA	APRIANTI KASIM	DESA POSSO	GORONTALO	GORONTALO	KWANDANG	Menengah	Perseroan Terbatas (PT)	Hak Milik	Telah diverifikasi	<button>Edit</button> <button>Delete</button>
2	KELAPA SAWIT	SRI NELVI	DESA CISADANE	GORONTALO	GORONTALO	KWANDANG	Menengah	Perseroan Terbatas (PT)	Hak Milik	Menunggu	<button>Edit</button> <button>Delete</button>

Gambar 5.3 Halaman Kelola Badan Usaha

Halaman ini merupakan tampilan Badan Usaha yang menampilkan untuk mengelola badan usaha. Di menu ini admin dapat melihat daftar badan usaha yang terdaftar, menambahkan badan usaha baru, mengedit informasi badan usaha, menghapus data badan usaha yang sudah tidak aktif.

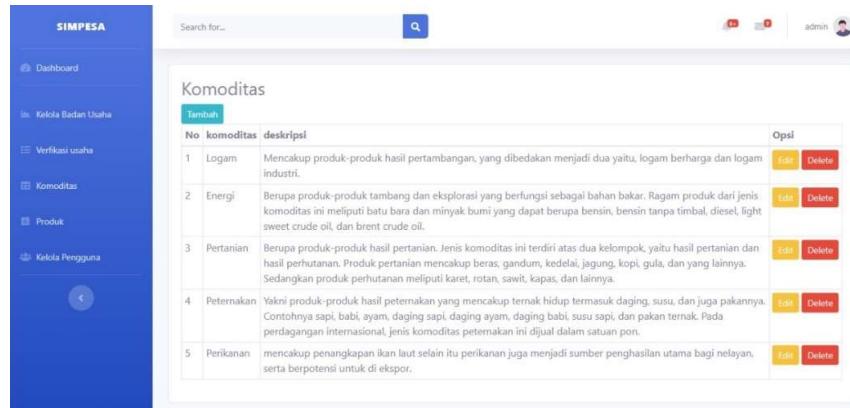
5.1.4 Tampilan Halaman Verifikasi Usaha



Gambar 5.4 Halaman Verifikasi Usaha

Halaman ini digunakan untuk menampilkan daftar usaha yang perlu diverifikasi. Dengan mengisi form-form yang ada, seperti nama usaha, pemilik, alamat, provinsi, kota, kecamatan, kategori usaha, bentuk usaha, status, dan persetujuan.

5.1.5 Tampilan Halaman Komoditas



Gambar 5.5 Halaman Komoditas

Halaman ini dapat melihat daftar komoditas beserta deskripsinya. Setiap baris dalam tabel berisis komoditas dan deskripsi. Admin dapat menambahkan jenis komoditas baru, mengedit deskripsi komoditas, menghapus komoditas jika tidak diperlukan.

5.1.6 Tampilan Halaman Produk

No	produk	satuan	harga satuan	Opsi
1	Gula Pasir	1kg	Rp.18	Edit Delete
2	Minyak kelapa	1 liter	Rp.41	Edit Delete
3	telur ayam	27000	Rp.2000	Edit Delete

Gambar 5.6 Halaman Produk

Halaman ini menampilkan daftar produk yang ditawarkan. Di sini admin bisa Menambahkan produk baru, menentukan satuan produk, menetapkan harga satuan produk, melakukan pengeditan atau penghapusan produk dengan tombol edit dan delete.

5.2 Analisa Sitem Yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini untuk mempermudah proses perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara. Sistem ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi online yang disebut OSS-RBA, sehingga masyarakat bisa mengurus izin usaha secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Fitur dalam sistem ini mencakup pengelolaan data usaha, verifikasi izin, serta pengaturan komoditas dan produk. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa PHP dan MySQL agar lebih stabil dan aman digunakan. Hasil uji coba menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik tanpa kendala. Namun, agar sistem ini benar-benar berhasil membantu masyarakat, perlu dilakukan peningkatan jaringan internet, pelatihan kepada pelaku usaha, serta penyediaan bantuan teknis yang mudah diakses. Dengan sistem ini, diharapkan pelayanan perizinan di Gorontalo Utara menjadi lebih praktis, cepat, dan dipercaya oleh masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi e-goverment dalam pelayanan perizinan usaha yang dilakukan pada dinas penanaman modal kabupaten gorontalo utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi E-Government melalui sistem SIMPESA di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara telah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha, menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor.
2. Kendala yang masih dihadapi dalam penerapan sistem ini meliputi keterbatasan literasi digital masyarakat, jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah, dan kurangnya sosialisasi terkait cara penggunaan sistem, sehingga diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan edukasi, infrastruktur, dan pendampingan teknis agar pemanfaatan E-Government dapat berjalan lebih optimal.

6.2 Saran

Meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem SIMPESA, baik melalui pelatihan, pendampingan teknis, maupun penyediaan informasi yang mudah diakses di berbagai media. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi, khususnya pemerataan jaringan internet di wilayah-wilayah yang masih terbatas aksesnya, agar pelayanan berbasis digital dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat. Dinas Penanaman Modal juga diharapkan menyediakan layanan bantuan teknis atau helpdesk yang responsif untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala. Terakhir, penting dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem SIMPESA agar selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pratama,R.,Khaerah, N., & Amir Muhiddin. (2019). Penerapan *E-Government* dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Publik di Kabupaten Bone.*Sosial dan politik*,04,100–111.
<https://journal.uwgm.ac.id/index.PHP/fisipublik>
- [2] Yulanda, A., & Fachri Adnan, M. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)* (Vol.1).
<https://isora.tpublishing.org/index.PHP/isora>
- [3] Dawud, J., Ramdhan, R., Abubakar, T., & Ramdani, D. F. (t.t.-a). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)*. <http://oss.go.id>
- [4] Lim, N. E., & Silalahi, M. (2023). Rancang Bangun Sistem E-Aministrasi Berbasis Codeigniter Framework Di KP2A Batam. *JURNAL COMASIE*, 08(1).
- [5] Bilyastuti, M. P. (t.t.). *Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo Dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu)*.
- [6] Bina, U., Gorontalo, T., Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (t.t.). *Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Governmnet Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo*.
- [7] Dawud, J., Ramdhan, R., Abubakar, T., & Ramdani, D. F. (t.t.-b). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)*. <http://oss.go.id>

- [8] Bao, B., Vallen Ayomi, H., Bakri, H., Ndibau, P., Sains dan Teknologi Jayapura, U., Sosial Padang Bulan, J., Abepura, K., & Jayapura, K. (t.t.). Penerapan *E-Government* dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 05(02), 4147–4157.
- [9] Adawiyah Ritonga, & Yahfizham Yahfizham. (2023). Studi Literatur Perbandingan Bahasa Pemrograman C++ dan Bahasa Pemrograman Python pada Algoritma Pemrograman. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 3(3), 56–63. <https://doi.org/10.55606/jutiti.v3i3.2863>
- [10] Hartati, E. (2022). *Sistem Informasi Transaksi Gudang Berbasis Website Pada CV. ASYURA*. 3(1).
- [11] Suhartini, M. S. K. P. (2020). Sistem Informasi Berbasis Web Sma Al-Mukhtariyah Membentuk Lauk Berbasis *PHP* dan *MySQL* Dengan Framework Codeigniter. *Jurnal Informatika dan Teknologi*, 3(5), 79–83.
- [12] Syafitri, Y. (2016). Pemodelan Perangkat Lunak Berbasis *UML* Untuk Pengembangan Sistem Pemasaran Akbar Entertainment Natar Lampung Selatan. *Jurnal Cendikia*, 12(1).
- [13] Farhan Londjo, M. (t.t.). *Implementasi White Box Testing Dengan Teknik Basis Path Pada Pengujian Form Login*. 7(2), 2021.
- [14] Nur Ichsanudin, M., Yusuf, M., Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, S., Teknik Industri, J., AKPRIND Yogyakarta, I., & Artikel, R. (2022). *Pengujian Fungsional Perangkat Lunak Sistem Informasi Perpustakaan Dengan Metode Black Box Testing Bagi Pemula*. *Info Artikel Abstrak*. 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.55123>.

RIWAYAT HIDUP



Nama	: Sri Nelviawati Noiyo
Tempat Tanggal Lahir	: Kwandang, 19 Mey 2003
Agama	: Islam
Fakultas	: Ilmu Komputer
Email	: srinelviawatinoiyo2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2015 telah menyelesaikan pendidikan Di SDN 17 Kwandang.
2. Tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan Di SMP Muhammadiyah Kwandang.
3. Tahun 2021 telah menyelesaikan pendidikan Di SMA Negeri 1 Gorontalo Utara.
4. Telah Melaksanakan pendidikan Starata 1-1 Ilmu Komputer Di Univeristas Ichsan Gorontalo pada tahun 2025.

Gorontalo, Mei 2025
Mahasiswa

Sri Nelviawati Noiyo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4833/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

KEPALA BADAN DINAS PENANAMAN MODALA DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : SRI NELVIAWATI NOIYO

NIM : T3121109

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Informatika

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Lokasi Penelitian : DINAS PENANAMAN MODAL

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 02/09/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln.. Kusno Damupojo No.Telp (0442) Kwandang Kode Pos 96252

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo Utara, menerangkan bahwa :

Nama : Sri Nelviawati Noiyo
NIM : T3121109
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Informatika
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gorontalo Utara selama 1 bulan tahun 2024. Dengan judul “ Implementasi Sistem E-Government Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo Utara ”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan oleh yang bersangkutan sebagai mestinya.

Kwandang, 23 April 2025
Kepala Dinas



Dokumen ini telah di tandatangani secara Elektronik.


Efendi S. Mobilingo, S.Sos
Pembina Utama Muda / IVC
NIP. 196912052000121003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Gorontalo Utara



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln.. Kusno DamopojoNo. Telp (0442) KwandangKodePos 96252

Nomor : 503/DPMPTSP/ 119/IX/2024

Kwandang, 23 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Penelitian (Pengambilan Data)

Yth.Ketua Lembaga Penelitian,Universitas Ichsan Gorontalo,

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Di –

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Universitas Ichsan Gorontalo, Lembaga Penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 4833/PIP/B.04/LP-UIG/2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data) tertanggal 02 September 2024, maka prinsip kami setuju terhadap penelitian (Pengambilan Data) dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, bahwa

Nama : Sri Nelviawati Noiyo

NIM : T3121109

Fakultas : Teknik

Program Studi : Teknik Informatika

Judul Penelitian : Implementasi Sistem E-Government Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo Utara

Lokasi : Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo Utara

Tetapi harus mengurus rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian disampaikan. atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Dinas

 Dokumen ini telah di tandatangani secara Elektronik.



Efendi S. Mobilingo, S.Sos
Pembina Utama Muda /IVC
NIP. 196912052000121003

Tembusan :

2. Pj. Bupati Gorontalo Utara



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 155/FIKOM-UIG/R/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Abraham Salihi, M.Kom
NIDN : 0928028101
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Sri Nelviawati Noiyo
NIM : T3121109
Program Studi : Teknik Informatika (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Komputer
Judul Skripsi : Implementasi E-Goverment Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **25%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Irvan Abraham Salihi, M.Kom
NIDN. 0928028101

Gorontalo, 2 Juni 2025
Tim Verifikasi,


Zulfrianto Y. Lamasigi, M.Kom
NIDN. 0914089101

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

0%	 Internet sources
13%	 Publications
23%	 Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
13%  Publications
23%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Student papers	Universitas Pamulang	3%
2	Student papers	Universitas Brawijaya	2%
3	Student papers	Universitas Muria Kudus	1%
4	Publication	Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar. "Implementasi Kebijakan Online Single Sub...	1%
5	Student papers	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
6	Student papers	Udayana University	<1%
7	Student papers	Surabaya University	<1%
8	Student papers	Jefferson County School District No. R-1	<1%
9	Student papers	Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI)	<1%
10	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
11	Student papers	Universitas Dian Nuswantoro	<1%

12	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
13	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
14	Student papers	Universitas Riau	<1%
15	Publication	Adiwarman P. Paputungan, Yaulie Deo Y. Rindengan, Steven Sentiuwo. "Sistem ...	<1%
16	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
17	Publication	Dadang Yunus Lutfiansyach, Mustofa Kamil, Jajat S. Ardiwinata. "BIMBINGAN TEK...	<1%
18	Publication	Fidyawati Abdul Rahman, Rusli Isa, Romy Tantu. "REVITALIZING PUBLIC SERVICE: ...	<1%
19	Publication	Agustina Sombo, Timbul Dompak. "Implementasi Pelayanan Berbasis Elektronik ...	<1%
20	Student papers	Southern Illinois University	<1%
21	Student papers	Universitas Sebelas Maret	<1%
22	Student papers	Kwame Nkrumah University of Science and Technology	<1%
23	Student papers	Universitas International Batam	<1%
24	Student papers	Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
25	Student papers	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	<1%

26	Student papers	
Universitas Airlangga		<1%
27	Student papers	
Universitas Pendidikan Ganesha		<1%
28	Publication	
Aulin Nurmawati, Kadi Abu Zakaria, Devi Puspita. "Survival UMKM Dalam Penge...		<1%
29	Publication	
Anjani Anjani, Sitna Hajar Malawat. "E-Government sebagai Bentuk Inovasi Peme...		<1%
30	Student papers	
Sriwijaya University		<1%
31	Student papers	
Universitas Raharja		<1%
32	Publication	
Saripuddin Muddin, Andi Haslindah, Rahmayanti Manatha, Sartika Sartika. "SISTE...		<1%
33	Student papers	
Universitas Jember		<1%
34	Student papers	
Universitas Negeri Medan		<1%
35	Publication	
Ayuntamara Sekar Choirul Anam, Choirul Anam. "PENERAPAN PRINSIP GOOD GO...		<1%
36	Publication	
Iin Wijayanti, Ajeng Pipit Fitriani, Diana Pramudya Wardhani. "EFISIENSI BIROKRA...		<1%
37	Student papers	
Universitas Darma Persada		<1%
38	Student papers	
Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II		<1%
39	Publication	
Muhammad Husni Rifqo, Nuri David Maria Veronica. "Implementasi Algoritme Na...		<1%